Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 3, Nomor 1, Februari 2022
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

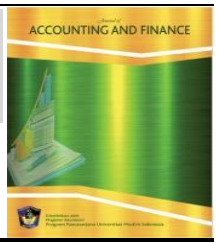

Analisis Penerapan Good University Governance Bagi Akuntabilitas Publik Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makssar

Jumriani[1], Masdar Mas'ud[2], Nurwanah[3].
[1]*Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.*
[2]*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.*
[1]***jumrianicacang@gmail.com***

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian adalah kualitatif, di mana dalam penelitian kualitatif, identitas serta peran informan maupun informasi menjadi hal yang penting, sebagai nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Makassar. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditetapkan sebanyak 8 orang. Analisis data menggunakan analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menemukan bahwa Good University Governance (GUG) sudah diaktualisasikan dengan baik di STIE Indonesia Makassar. Ini berarti GUG telah dipahami sebagai sistem tata kelola sekolah tinggi yang baik yang diterapkan sesuai dengan struktur kepemilikan (batasan tugas dan wewenang pihak penelitian perguruan tinggi dan profesionalisme pengelola), tanggungjawab dan otorisasi terkait dengan hubungan keuangan, transparansi keuangan dan informasi serta kepemimpinan dan manajemen yang mengatur organisasi dan hubungan lini di lingkup perguruan tinggi. Penerapan Good University Governance (GUG) bagi akuntabilitas publik telah diterapkan di STIE Indonesia Makassar. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawabkan perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada publik baik secara upward, downward dan inward telah dilaksanakan dalam mewujudkan STIE Indonesia Makassar yang akuntabel. Sementara outward accountability yang terkait dengan pertanggungjawaban pemangku kepemimpinan atas kebijakan dan tindakan kepada masyarakat masih menemukan kendala, dikarenakan ada perbedaan visi dan misi antara perguruan tinggi dengan pihak luar.

Kata Kunci: Good University Governance, Akuntabilitas Publik, Perguruan Tinggi Akuntabel

ABSTRACT

This research uses a case study approach. This type of research is qualitative, where in qualitative research, the identity and role of informants and information becomes important, as scientific values that can be accounted for. The location of the research was carried out at the Indonesian College of Economics (STIE) Makassar. Data collection techniques include in-depth interviews, observation and documentation. Research informants set as many as 8 people. Data analysis using qualitative analysis includes data reduction, data presentation and data verification. The results of the study found that Good University Governance (GUG) has been well actualized at STIE Indonesia Makassar. This means that GUG has been understood as a good high school governance system which is implemented in accordance with the ownership structure (limited duties and authorities of the university research party and the professionalism of the manager), responsibilities and authorizations related to financial relationships, financial and information transparency as well as leadership and management. regulate the organization and line relationships within the scope of the university. The implementation of Good University Governance (GUG) for public accountability has been implemented at STIE Indonesia Makassar. This is a form of university accountability in providing higher education services to the public in an upward, downward and inward manner, which has been implemented in realizing an accountable STIE Indonesia Makassar. Meanwhile, outward accountability related to the accountability of leadership stakeholders for policies and actions to the community still encounters obstacles, because there are differences in vision and mission between universities and outside parties.

Keywords: Good University Governance, Public Accountability, Accountable Universities

PENDAHULUAN

Di tengah gencarnya penerapan good governance sebagai landasan nilai penyelenggaraan tata kelola di sektor publik, muncul paradigma Good university governance (GUG) yang menjadi sebuah tuntutan yang harus diterapkan di perguruan tinggi. Hal tersebut didasari oleh keberadaan perguruan tinggi sebagai pusat intelektual dan organisasi penyedia layanan publik berupa pendidikan. Tuntutan penataan diri perguruan tinggi melalui implementasi prinsip-prinsip GUG akan menjadi salah satu kunci pokok bagi pengembangan perguruan tinggi sebagai agen pencetak generasi penerus bangsa.

Akuntabilitas sektor publik juga menjadi bagian penting dalam dinamika good governance. Dalam rangka menciptakan GUG yang utuh, perlu diselaraskan dengan keberhasilan reformasi anggaran. Untuk mendukung terwujudnya good university governance maka pengelolaan keuangan publik harus diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Wu jud dari pengelolaan keuangan publik memerlukan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan good governance Juliani, (2018:39).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dalam hal ini pendidikan tinggi menjadi peluang tersendiri bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS) untuk berlomba-lomba menarik minat masyarakat agar memilih institusinya. Namun persaingan PTS dalam memperebutkan pasar mahasiswa ini cukup berat. Jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Sulawesi Selatan mencapai 235 Perguruan Tinggi (PT) yang terbagi atas 11 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 224 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (http://id.wikipedia.org. Akses tanggal 7 Agustus 2021).

Salah satu elemen penting dari reformasi PT adalah University Governance (UG), sering disebut Good university governance (GUG). GUG dianggap sebagai elemen penting PT untuk dapat mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan. Tujuan GUG adalah untuk mengakomodasi internasionalisasi PT, meningkatkan daya saing, kualitas proses pembelajaran, kualitas manajemen internal, dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan Henard dan Mitterle, (2018:85).

Praktik GUG itu sendiri berdampak bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi kiranya belum banyak ditemukan. Akuntabilitas publik merupakan satu elemen penting dalam reformasi pendidikan tinggi di Indonesia yang wajib diwujudkan oleh perguruan tinggi (Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014) terkait dengan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Keberadaan akuntabilitas publik dihubungkan dengan posisi perguruan tinggi (dan badan penyelenggaranya) sebagai "pemegang mandat" dari masyarakat terkait dengan pelayanan sektor publik bidang pendidikan tinggi. Akuntabilitas publik merupakan jalan bagi perguruan tinggi, termasuk di dalamnya perguruan tinggi swasta (PTS) untuk bisa menjelaskan dan menjawab setiap keputusan dan proses pengelolaan pendidikan tinggi yang dilakukannya secara transparan kepada stakeholders. Pengelolaan pendidikan tinggi yang dimaksud adalah GUG. Oleh

karena itu, selain untuk mengukur apakah "mandat masyarakat'" terkait pengelolaan otonomi pendidikan tinggi terwujud dengan baik Haryatmoko, (2018:141), akuntabilitas publik juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dari masyarakat, sekaligus sebagai saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebagian besar PTS masih sulit mencapai predikat perguruan tinggi yang berkualitas dengan tatakelola yang baik *(Good University Governance).* Hal ini terbukti dari 3.6% jumlah PTS yang sudah mengajukan Akreditasi, hanya 4.5% yang memperoleh akreditasi A. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi PTS didalamnya masih stagnan. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu: disorientasi pendiri yayasan, persepsi tentang rendahnya kualitas mahasiswa, serta rendahnya kualitas tenaga pengajar. Sementara pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Makassar yang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi swata menyelenggarakan layanan umum berupa pendidikan sudah menerapkan GUG yang menunjukkan pengelolaan keuangan perguruan tinggi, sudah cukup baik. Hal yang mendasar agar penguatan akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta dapat berhasil dengan penerapan GUG.

Hasil observasi awal menunjukkan STIE Indonesia Makassar dalam penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) secara konsisten dan berkesinambungan sudah mencapai 70 persen, artinya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang diharapkan > 90 persen. Perlu ada upaya peningkatan budaya mutu serta pelayanan akademik dan non akademik perguruan tinggi, diharapkan berkontribusi pada pencitraan yang positif, reputasi yang unggul dan kualitas daya saing yang tinggi.

Wijatno (2019:15) teori aplikasi GUG pada perguruan tinggi dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, responsiblitas, independensi dan keadilan. Hal ini bersesuaian dengan penelitian ini untuk melihat penerapan GUG bagi akuntabilitas publik pada perguruan tinggi swasta STIE Indonesia Makassar, di mana GUG pada perguruan tinggi harus bisa dipertanggungjawabkan secara upward, downward, inward dan outward.

Uraian latar belakang di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui praktik dari GUG pada Perguruan Tinggi Swasta, dengan memilih judul "Analisis Penerapan Good University Governance bagi Akuntabilitas Publik Pada STIE Indonesia Makassar".

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Winarno (2018:58) tata kelola yang baik merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran pimpinan dan bawahannya dalam satu organisasi. Tata kelola sebagai sistem check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian organisasi membatasi munculnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset, serta merupakan proses yang transparan atas penentuan tujuan organisasi, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. Tata kelola yang baik mempunyai lima macam tujuan utama yaitu: (1) melindungi hak dan kepentingan pimpinan, (2) melindungi hak dan kepentingan bawahan, (3)

meningkatkan nilai organisasi, (4) meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dan (5) meningkatkan mutu hubungan pimpinan dan bawahan Thomas, (2018:8).

Benang merah memahami keberadaan tata kelola terletak pada kegiatan melibatkan lebih dari dua orang melakukan suatu kegiatan dalam mengatur sesuai penataan optimal mencapai tujuan. Rhodes (2017:8) menyatakan bahwa tata kelola menjadi penting dalam pengaturan organisasi. Tata kelola melibatkan organisasi, manajemen dan administrasi, karenanya tata kelola menjadikan organisasi sebagai proses penggabungan pekerjaan individu atau kelompok mencapai tujuan.

2. Konsep Perguruan Tinggi

Konsep perguruan tinggi pada prinsipnya mengkaji tiga hal yaitu penyelenggaraan, sistem pendidikan dan kepengurusan. Sumirwan (2019:183) menyatakan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi didasarkan pada penguatan badan hukum, memiliki sistem pendidikan dan kepengurusan. Berikut digambarkan konsep perguruan tinggi di bawah ini:

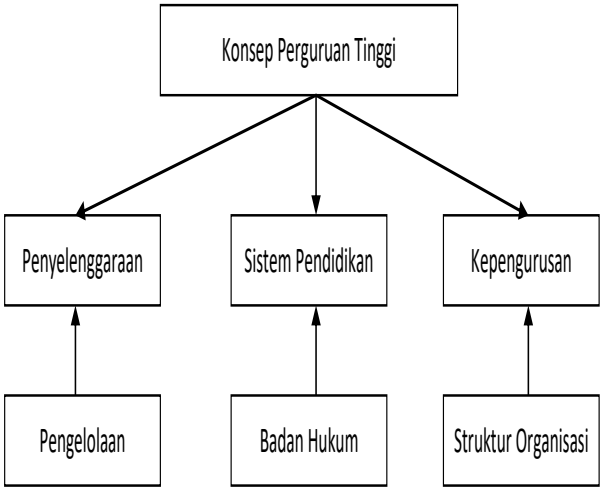

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam perguruan tinggi terlibat kegiatan penyelenggaraan yang didukung dengan pengelolaan, sistem pendidikan sesuai badan hukum dan kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi. Perguruan tinggi pada prinsipnya merupakan ketatalaksanaan dari perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan satuan pendidikan. Perguruan tinggi diselenggarakan atas dasar proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) Sastomo, (2017:75).

Djokopranoto (2017:83) menyatakan konsep penyelenggaraan perguruan tinggi dibedakan atas dua yaitu konsep perguruan tinggi swasta dan konsep perguruan tinggi negeri. Konsep perguruan tinggi swasta, penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh masyarakat berbentuk yayasan atau badan bersifat sosial dan memiliki badan hukum pendidikan. Penyelenggaraan perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Dikti dalam bentuk perguruan tinggi negeri memiliki badan hukum milik negara. Berikut digambarkan penyelenggaraan perguruan tinggi di bawah ini:

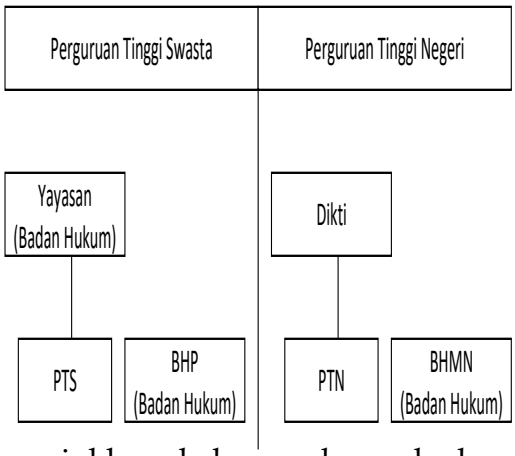

Gambar di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta, segala kegiatannya berkaitan dengan penyelenggaraan dibentuk atas kemauan dan kemampuan masyarakat dari yayasan atau badan sosial. Sedangkan perguruan tinggi negeri tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh Dikti dalam melakukan penyelenggaraannya.

Memahami konsep perguruan tinggi, mengacu kepada penguatan hukum sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Soeraji (2019:64) menyatakan bahwa kekuatan hukum tata kelola perguruan tinggi secara prinsip mengatur hal berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kunci keberhasilan perguruan tinggi mandiri dan otonom ditentukan oleh kemampuan meningkatkan kualitas. Martha dan Stephen (2017:27) menyatakan perguruan tinggi merupakan sebuah metode manajemen, administrasi dan organisasi dalam menciptakan dan membentuk perguruan tinggi yang mampu membangun kemandirian dan otonomi melalui paradigma perubahan lebih baik dan berkualitas. Yokahoma (2017:27) mewujudkan perguruan tinggi yang baik berbanding lurus dengan perubahan paradigma layanan dan kepuasan dari hasil tata kelola. Rhomand (2016:71) menyatakan perguruan tinggi yang berkualitas ditandai dengan bersinerginya kegiatan akademik, manajerial dan keuangan.

3. Good University Governance

Semua entitas yang menjalankan pengelolaan dan stakeholders adalah masyarakat luas memerlukan good governance Indrajit dan Djokopranoto, (2017:275). Perguruan Tinggi adalah entitas yang memerlukan pengelolaan baik dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka perlu melaksanakan GUG, agar dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dengan baik dan benar. Perguruan tinggi di negara-negara maju sudah sejak lama menyadarinya dan melaksanakan GUG. Pada tahun 1960, GUG sudah diberikan definisinya oleh Corson dalam Indrajit dan Djokopranoto, (2017:133), yaitu suatu proses pengambilan keputusan untuk membuat peraturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara berbagai anggota komunitas college atau sekolah tinggi (cendekiawan, mahasiswa, pengajar, administrator dan pimpinan). Peraturan ini dilaksanakan dengan tujuan meminimalkan konflik, meningkatkan kerja sama dan menjamin kebebasan individu.

Secara sederhana GUG kemudian dapat dimengerti sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar good corporate governance dalam sistem dan pengelolaan institusi perguruan tinggi. Menurut The Indonesian Institute of Corporate Governance – IICG (2019), good corporate governance didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, konsep GUG menjadi sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan seiring dengan maraknya penerapan konsep tata kepemerintahan yang baik, yaitu good governance. Pada dasarnya, konsep GUG hampir sama dengan konsep good governance pada umumnya. Akan tetapi, yang membedakan penerapan good governance di lingkungan sekolah tinggi dengan di sebuah negara atau perusahaan adalah terkait dengan nilai-nilai luhur pendidikan yang harus tetap dijunjung tinggi dalam penerapannya.

Wahab (2018:33) dalam penelitiannya mengatakan GUG merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran, bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi. Dalam pendidikan tinggi terdapat nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam mendapatkan keunggulan bersaing. GUG berfokus pada transfer atau konservasi ilmu pengetahuan (knowledge) dan diharapkan dapat membantu komunitas memegang teguh nilai-nilai (values) yang luhur tersebut.

Mengingat pentingnya GUG dalam pengelolaan pendidikan, maka Pemerintah perlu mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta peraturan turunannya. Namun dari berbagai peraturan tersebut yang kemudian juga diadopsi untuk penilaian dalam akreditasi pada perguruan tinggi, governance yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya menyangkut tatahubungan yang terbatas, yaitu: 1) struktur organisasi; 2) fungsi dan tugas personil; 3) mekanisme tatapamong; 4) kepemimpinan Indrajit dan Djokopranoto, (2018:188).

Selanjutnya Indrajit dan Djokopranoto mengemukakan adanya unsur governance yang belum tercakup atau sekurang-kurangnya tidak tercermin secara jelas dalam penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Unsur governance yang belum tercakup tersebut dikemukakan dengan mengacu pada pada The Seven Principles of Public Life yang dikembangkan oleh Standard & Poor sebagai panduan Indrajit dan Djokopranoto, (2018:281), yaitu: pertama, struktur dan pengaruh kepemilikan; kedua, hubungan keuangan stakeholders; ketiga, transparansi keuangan dan keterbukaan informasi; dan keempat, struktur serta proses dewan dan manajemen.

Keempat bidang ini dijabarkan ke dalam sub bidang sesuai dengan kegiatan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, yang kalau tidak diukur justru berpotensi

melemahkan pertanggungjawaban PTS (meskipun PTS yang bersangkutan memperoleh penilaian baik oleh BAN), sehingga dapat merugikan stakeholders dan memperbesar risiko PTS sebagaimana dimaksud dalam anatomi permasalahan PTS Dikti, (2017). Secara keseluruhan unsur governance tersebut dituliskan pada tabel berikut ini:

1. Struktur dan Pengaruh Kepemilikan	2. Hubungan Keuangan
- Transparansi kepemilikan - Batas wewenang pemilik/pendiri - Tugas dan wewenang penyelenggara - Keterpisahan penyelenggara pemilik - Profesionalisme pengelola	- Tanggungjawab keuangan - Otorisasi keuangan - Sumber keuangan - Pembuatan anggaran - Laporan tahunan - Laporan keuagnan - Kebijakan pengelolaan
3. Transparansi Keuangan dan Informasi	4. Kepemimpinan dan Manajemen
- Transparansi keuangan - Perincian beban mahasiswa - Audit keuangan - Independensi auditor - Pengumuman laporan keuangan - Sistem penilaian kerja/imbal jasa - Kemudahan akses informasi - Peraturan kepegawaian	- Organisasi dan hubungan lini - Unsur dan komposisi - Tugas dan tanggungjawab - Periodisasi kepemimpinan - Jabatan rangkap - Etika profesi

Pada sisi lain, kelalaian atau ketidaksengajaan PTS dalam mewujudkan GUG tersebut di atas tersebut menjadikan PTS melemah dalam memberikan pertanggungjawaban dan berisiko tidak mampu menjalankan visi misinya, memenuhi target kinerja yang ditentukan dan mencapai standar yang ditentukan, bahkan berisiko pada persoalan hukum yang menghancurkan reputasi PTS. Persoalan risiko ini yang perlu diantisipasi PTS dan untuk hal itulah pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko (reputasi) dalam pengelolaan PTS bersamaan dengan pelaksanaan GUG.

4. Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi Swasta

Akuntabilitas publik menunjuk pada pertanggungjawaban pejabat atas kekuasaan (kewenangan) yang dipercayakan warga negara untuk menjalankan pelayanan publik Haryatmoko, (2018:141). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut Krina, (2018:23).

Tujuan akuntabilitas program-program pada perguruan tinggi bergeser ke arah kualitas pendidikan, produktivitas organisasi, dan responsibilitas eksternal terhadap prioritas-prioritas masyarakat atau tuntutan pasar Burke, (2018:57). Hal ini tidak lepas dari tekanan adanya konsep Tiga Pilar Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana digambar Burke (2018:58):

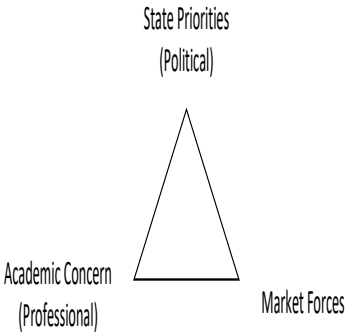

Berdasarkan konsepsi ini, maka akuntabilitas sebuah PTS sebagai organisasi publik, bersifat internal berupa tanggung gugat kepada atasan atau pihak badan penyelenggara saja, tetapi juga memiliki dimensi tanggung gugat kepada pihak-pihak luar sebagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, organisasi publik didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nurhayati, (2017:33).

Pada dasarnya akuntabilitas publik perguruan tinggi juga mengandung pengertian, bahwa PTS harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat. Akuntabilitas publik dipakai untuk mengukur atau menilai apakah 'mandat masyarakat' terkait pendidikan tinggi yang terwujud dalam otonomi kampus dijalankan dengan baik Haryatmoko, (2018:141). Di sisi lain, akuntabilitas publik perguruan tinggi bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat yang telah memberi mandat di dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi.

Akuntabilitas publik PTS tentunya hendak dicapai tidak semata-mata hanya karena dengan alasan memenuhi peraturan perundang-undangan atau kepentingan administratif. Perguruan tinggi yang akuntabel akan memperoleh dampak positif yang dapat mendukung keberlanjutan perguruan tinggi itu sendiri, di antaranya: 1) lebih mempunyai legitimasi; 2) mendapat dukungan dari stakeholders termasuk dari dunia usaha; 3) memiliki kepemimpinan yang dapat dipercaya; dan 4) kemandirian perguruan tinggi baik dalam hal pendanaan maupun akses pada sumber daya penting lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya akuntabilitas publik PTS dapat dikemukakan menyangkut tiga aspek penekanan, yaitu: Haryatmoko, (2018:149)

a. Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban mandat kewenangan (otonomi perguruan tinggi) melalui keterbukaan perguruan tinggi (G.E. Caiden).
b. Akuntabilitas sebagai tanggung jawab dan liabilitas, sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi (J.G. Jabbra).
c. Tekanan lebih pada hak masyarakat untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi (Guy Peters).

Perguruan tinggi harus mewujudkan akuntabilitas publik dengan cara memenuhi kewajiban untuk: menjalankan visi dan misinya sesuai dengan izin yang diberikan, mencapai target kinerja yang ditetapkan badan penyelenggara, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Tahun 2014.

Tinjauan Hasil Penelitian

Tinjauan hasil penelitian merupakan tinjauan mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran tentang pemahaman peneliti di dalam melakukan sebuah penelitian yang berasal dari hasil pemikiran tentang pentingnya mewujudkan perguruan tinggi swasta yang akuntabel dengan mengambil kasus pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Makassar.

STIE Indonesia Makassar dalam mengembang kiprahnya sebagai lembaga perguruan tinggi swasta diharuskan mampu mengembang tata kelola sekolah tinggi yang baik *(good university governance)* dengan mengedepankan tata keuangan struktur dan kepemilikan perguruan tinggi, menjamin terciptanya hubungan keuangan bagi pemilik, mampu melakukan transparansi keuangan dan informasi, serta mengembangkan kepemimpinan dan manajemen. Ini relevan dengan pendapat Srihariotoo dan Wardhani (2019:21) tata kelola yang baik diterapkan di lingkungan perguruan tinggi dinilai berdasarkan struktur dan kepemilikan, hubungan keuangan, transparansi keuangan dan informasi serta kepemimpinan dan manajemen.

Mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel tidak terlepas dari pentingnya menerapkan Peraturan Pemeritnah Nomor 04 Tahun 2014 Pasal 33 terkait dengan pertanggungajwaban perguruan tinggi kepada masyarakat, yang relevan dengan akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta yang bersandar pada tanggungjawab bawahan kepada atasan *(upward accountability),* atasan kepada bawahan *(downward accountability),* staf pengajar dalam menerapkan standar profesional dan etis (inward accountability) dan kepada masyarakat *(outward accountability).* Ini bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan Krina (2018:23) bahwa akuntabilitas publik perguruan tinggi dinilai sesuai pertanggungjawaban yang ditunjukkan secara upward, downward, inward dan outward accountabilities.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tuangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut

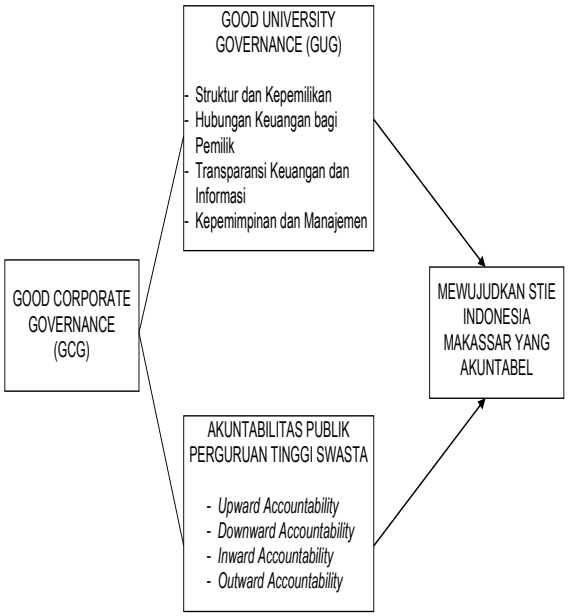

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada penerapan good university governance (GUG) bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta pada STIE Indonesia Makassar. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penerapan GUG pada perguruan tinggi swasta dan keterkaitan GUG bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta. Studi kasus mengarahkan peneliti untuk menjawab dan mengungkap suatu realitas yang memberi peluang peneliti atas peristiwa yang diteliti dalam penelitian ini.

Jenis penelitian adalah kualitatif, di mana dalam penelitian kualitatif, identitas serta peran informan maupun informasi menjadi hal yang penting, sebagai nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memberikan klarifikasi atau informasi atas temuan justifikasi ilimiah.

Pengelolaan Peran sebagai Peneliti

Peneliti menjadi perencana, analis, penafsir data, dan selanjutnya melaporkan hasil penelitiannya. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian di sini sudah tepat, mengingat bahwa yang bersangkutan menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian Nasution, (2017:85).

Penempatan peneliti sebagai instrumen memiliki syarat, antara lain: bersikap responsif, penyesuaian diri, menekankan keutuhan (memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan), Perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan serta memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkretik Sumarsono, (2018:141).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Makassar sebagai obyek penelitian untuk melihat penerapan GUG bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta. Adapun waktu penelitian dijadwalkan tiga bulan mulai Nopember 2021 sampai Januari 2022.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yang terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1.Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil:

a. Wawancara, melakukan wawancara secara mendalam dan bebas kepada subyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan tape recorder. Informan yang diwawancarai terdiri atas informan kunci yaitu Ketua Yayasan dan Ketua STIE Indonesia Makassar, yang berarti informan kunci sebanyak 2 orang. Selanjutnya informan biasa yaitu; ketua jurusan sebanyak 2. orang, staf bagian administrasi/tata usaha 2 orang dan mahasiswa sebagai pengguna (user) sebanyak 2. orang. Total informan sebanyak 8 orang.

b. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan penelitian yang terjadi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) mengambil data dari sejumlah buku, literatur, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1.Data Primer

a. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara mendalam yang peneliti rencanakan dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya sehubungan dengan pertanyaan penelitian. Wawancara ini di lakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dicermati.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran penerapan GUG bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta pada STIE Indonesia Makassar. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang di anggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah pengamatan, peneliti mampu mendapat gambaran langsung bagaimana kondisi di lapangan yang akan membantu peneliti dalam merumuskan hasil penelitian.

2.Data Sekunder

Dokumentasi sebagai data sekunder sebagai penunjang atau pengkuatan kajian fokus pengamatan. Dokumentasi yang di maksudkan disini seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, tesis, jurnal, dan lain-lain yang termasuk dengan masalah penelitian yaitu analisis penerapan GUG bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta pada STIE Indonesia Makassar.

Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang difokuskan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi dalam hubungannya dengan penerapan GUG bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta pada STIE Indonesia Makassar.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini ditujukan untuk memilih data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian dilaksanakan, yang selanjutnya analisis data kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1.Reduksi Data

Saat peneliti melakukan pengambilan data di lapangan banyak kerumitan yang dilalui dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti mencatat, merekam semua jawaban yang dikemukakan oleh sumber data, beragam data yang penulis peroleh. Ada jawaban yang sama ada juga jawaban yang berbeda terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

2.Menyajikan Data

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisirkan, memberikan

pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena yang terjadi, setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun atau menyajikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang berkenaan dengan penerapan GUG bagi akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta pada STIE Indonesia Makassar.

3.Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan
Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut dan mencari makna dari data ulang dikumpulkan, berbobot dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, Selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat naratif.

Setelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk naratif berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah, kesimpulan yang diajukan sekaligus sebagai temuan penelitian.

Pengecekan Validitas
Data yang terkumpul dilakukan pengecekan validitas melalui triangulasi (pengamatan yang melibatkan unsur peneliti, metode dan obyek yang diamati), sesuai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data bersangkutan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara sistematik diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenaran data.
2. Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, gambar dan foto.
3. Triangulasi teori yaitu rumusan informasi yang dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual penelitian atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ditunjukkan matriks etik dan emik dari penerapan GUG bagi akuntabilitas publik di STIE Indonesia untuk melihat kesesuaian temuan dan makna hasil wawancara dengan informan yang diamati

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan. Pendidikan tinggi menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman. Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,

dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam suatu sistem pendidikan, pendidikan tinggi disebut tertiary education, yang merupakan suatu jenjang yang dapat diikuti setelah jenjang pendidikan menengah *(secondary education)* seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah dan sederajat. Satuan pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau community college.

Fungsi dari pendidikan tinggi adalah mengembangkan peradaban bangsa dalam mencerdaskan kehidupan, mengembangkan Sivitas Akademika, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun tujuan dari pendidikan tinggi adalah mengembangkan seluruh potensi Mahasiswa, menghasilkan lulusan yang berdaya saing, menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian, dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

STIE Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi swasta memiliki misi dan fungsi penting yaitu memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan tinggi yang ideal adalah pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat mengelola dan menghasilkan lulusan, cendekiawan, ilmuwan, dan profesional.

Untuk dapat menjalankan peran sebagai pengawal budaya akademik dan ilmiah, STIE Indonesia berbentuk sebuah lembaga independen, dengan tata kelola yang berbasiskan otonomi yang akuntabel (UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi). Melalui penerapan Good University Governance (GUG) sebagai tata kelola perguruan tinggi mampu memberikan kebebasan akademik dan ilmiah bagi civitas akademikanya sehingga mereka mampu berkembang secara maksimal menjadi akademisi dan ilmuwan unggulan. Adanya akademisi dan ilmuwan unggulan akan mampu membangun bangsa dan negara mencapai kemajuan. Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi memiliki konsekuensi untuk memenuhi makna bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Dalam hal ini konsep otonomi perguruan tinggi sangat berkaitan dengan penjaminan mutu atas proses pembelajaran serta produknya, dalam rangka memenuhi akuntabilitas Perguruan Tinggi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan.

Konsep akuntabilitas penting karena pendidikan tinggi seperti STIE Indonesia perlu menjamin setiap kinerja komponen perguruan tinggi kepada para stakeholder-nya bahwa perguruan tinggi tersebut telah menyediakan pendidikan yang berkualitas baik. Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam konteks organisasi pendidikan tinggi adalah masyarakat pemerintah, dan perguruan tinggi.

Komponen yang menjadi akuntabilitas kinerja perguruan tinggi, mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdiri atas komponen-komponen utama dan penunjang di pendidikan tinggi, yang pada dasarnya mencakup: (1) proses pembelajaran, (2) kurikulum, (3) dosen (4) fasilitas pembelajaran, (5)

pendanaan, dan (6) penelitian, yang didukung oleh supporting components yaitu (1) manajemen dan (2) kepemimpinan. Komponen-komponen pendidikan tinggi dapat dibagi menjadi tiga lapis, yaitu (1) proses pembelajaran as a core component (proses pembelajaran sebagai komponen inti); (2) essential components (komponen esensi) yang terdiri atas kurikulum, dosen, fasilitas pembelajaran, pendanaan, dan penelitian, dan (3) supporting components (komponen pendukung) yang terdiri atas manajemen dan kepemimpinan.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan nampak masih terjadi kesenjangan yang lebar antara realita pendidikan tinggi dengan hakikat pendidikan tinggi, terutama berkaitan dengan akuntabilitas komponen-komponen pendidikan tinggi, seperti proses pembelajaran yang belum optimal, implementasi kurikulum yang belum stabil dan kurang tanggap terhadap kebutuhan mahasiswa, kompetensi dosen yang masih perlu ditingkatkan, fasilitas pembelajaran yang masih perlu dilengkapi dalam mendukung proses pembelajaran, atau pun penelitian yang belum menjadi andalan STIE Indonesia, padahal melalui riset, proses pembelajaran dapat menjadi lebih layak dengan adanya knowledge creation dan knowledge innovation.

STIE Indonesia telah berupaya untuk memfungsikan dirinya secara benar. STIE Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara umum dan juga mampu mendidik masyarakat agar memaknai hakikat pendidikan tinggi. Untuk mencapai kondisi yang akuntabel, maka kesamaan persepsi dan kebijakan yang selaras antara para pemangku kepentingan yaitu masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi sehingga akuntabilitas perguruan tinggi terus berkelanjutan.

Perwujudan akuntabilitas publik menuntut STIE Indonesia memiliki perencanaan dan implementasi yang jelas, mulai dari perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya. Penerapan GUG di STIE Indonesia ditentukan oleh kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang efektif. Selain itu, perhatian perguruan tinggi terhadap komponen peserta didik (mahasiswa) dan lulusannya penting dan melayani proses pembelajaran dan mempertahankan mutu lulusan. Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya) menjadi unsur penting bagi STIE Indonesia untuk meningkatkan kapasitas lembaga secara keseluruhan. Unsur penting lain yaitu kurikulum, proses pembelajaran, dan suasana akademik. Semua itu tentunya didukung oleh aspek pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang memadai. Dalam mewujudkan visi dan misi lembaga, aspek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai bentuk kerja sama (dalam negeri maupun luar negeri) sangat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu di perguruan tinggi.

Semua itu dilakukan untuk mencapai penguatan STIE Indonesia, otonomi, akuntabilitas, dan citra publik, termasuk kepercayaan publik. Sebagaimana dikemukakan Bovens (2018:146) dalam teori accountability for college menyatakan "…two main aspects of accountability for college: accountability as a virtue and accountability as a mechanism. In the former case, accountability is used primarily as a normative concept, as a set of standards for the evaluation of the behaviour of public actors. Accountability or, more precisely, being accountable, is seen as a positive quality of organisations or officials".

Nessil (2017:79) menyebutkan teori virtue bahwa akuntabilitas merupakan suatu kebajikan (virtue) yang dijadikan sebagai konsep normatif dan sebagai standar penilaian yang digunakan untuk evaluasi kinerja. Akuntabilitas juga dapat dilihat sebagai mekanisme (mechanism) yang lebih berkaitan dengan bagaimana suatu lembaga beroperasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuatnya. Kedua konsep tersebut dapat digunakan dalam menganalisis kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas lembaga saat dimintai pertanggungjawaban oleh stakeholders.

Teori accountability dari Trow (2019:110) akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk memberikan alasan pembenaran, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah dipergunakan dan apa dampaknya. Teori obligation dari Burk (2018:152) akuntabilitas sebagai "an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one"s actions". Dalam hal ini akuntabilitas merupakan suatu kewajiban atau kesediaan untuk bertanggung jawab atau menjelaskan tindakan seseorang atau suatu lembaga.

STIE Indonesia debagai salah satu lembaga publik, tugas utama lembaga pendidikan tinggi adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, kinerja lembaga pendidikan tinggi perlu dilaporkan kepada publik secara akuntabel, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab atas rencana kinerja dan capaian kinerja lembaga pendidikan tinggi secara keseluruhan dalam mencapai mutu yang diharapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban ini mencakup perwujudan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi kepada pihak pemberi mandat/amanah (stakeholders). Pertanggungjawaban ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Pada perkembangannya, penerapan GUG bagi akuntabilitas publik digunakan sebagai panduan perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Akuntabilitas publik untuk perguruan tinggi diimplementasikan secara upward accountability, downward accountablity, inward accountablity, dan outward accountability, yang didasarkan pada unsur-unsur transparansi, partisipasi, evaluasi, dan ketanggapan (responsiveness) dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan tinggi dalam memenuhi kriteria keterlaksanaan proses dan ketercapaian tujuan.

Penerapan GUG bagi akuntabilitas publik pada STIE Indonesia sebagai pertanggungjawaban institusional yang menyeluruh atas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Pertanggungjawaban umumnya terfokus pada pertanggungjawaban hierarkis struktural. Pertanggungjawaban semacam itu menyebabkan STIE Indonesia harus selalu melakukan penatalaksanaan pertanggungjawaban keuangan.

Tujuan akuntabilitas publik untuk meningkatkan pemahaman dan prioritas nasional untuk tujuan memperkuat kebijakan publik. Selain itu juga dinyatakan bahwa akuntabilitas memerlukan tanggung jawab bersama dan dibentuk atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan didasarkan pada ketakutan dan penolakan.

Akuntabilitas publik perguruan tinggi diarahkan dalam pencapaian outcome yang disepakati, ditetapkan, dan dapat diukur, serta didasarkan pada kepentingan publik yang sah untuk mencapai akuntabilitas atas berbagai tindakan dan proses.

Pembahasan di atas dikaitkan dengan penelitian sebelumnya dilihat dari penelitian Agustina (2016) dengan hasil penelitian menemukan bahwa prinsip good university governance berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menunjukkan ada perbedaan, karena pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu pada penelitian terdahulu meneliti mengenai prinsip GUG, sedangkan penelitian ini meneliti penerapan GUG bagi akuntabilitas publik, sehingga dapat dikatakan ada keterbaruan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Selain itu penelitian Machmudah (2019) dan Amilin (2016) keduanya meneliti mengenai GUG yang fokus pada pencapaian kinerja. Implikasi kedua penelitian tersebut menunjukkan GUG berperan terhadap kinerja perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi diharuskan menerapkan GUG untuk meningkatkan kinerja perguruan tingginya. Persamaan terletak pada subjek penelitian yaitu GUG pada perguruan tinggi. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan hasil penelitiannya. Pada penelitan ini menemukan bahwa penerapan GUG menentukan pencapaian akuntabilitas publik.

Penelitian Fuad (2018) dan Mutiarin (2019) mengamati implementasi GUG di mana hasil peneltian menunjukkan GUG menjadi kunci sukses untuk menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Sementara penelitian ini menemukan penerapan GUG menjadi penentu mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel. Lain lagi dengan penelitian Muhsin (2020) yang terlihat mengamati mengenai hubungan dari penerapan GUG dan kepuasan mahasiswa, yang terlihat menggunakan analissi kuantitatif, dengan hasil penelitian kualitas mengajar tidak signifikan terhadap penerapan GUG. Sementara dalam penelitian ini penerapan GUG pada perguruan tinggi berfokus pada struktur kepemilikan, hubungan keuangan, transparansi keuangan dan informasi serta kepemimpinan dan manajemen. Ini berarti ada keterbaruan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Hasil peneltian dari Ayu (2020) dengan hasil peneltian penerapan GUG yang tinggi pada suatu perguruan tinggi swasta akan meningkatkan keunggulan bersaing dengan didukung oleh peranan yang kuat dari para dosen, staff/karyawan, mahasiswa dan dukungan manajemen stakeholder. Dan penelitian Wahyuddin (2017) yang menemukan variabel GUG terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap struktur organisasi, manajemen perencanaan, dan kinerja manajemen keuangan. Kedua penelitian di atas menggunakan analisis kuantitatif, sehingga terlihat ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini menemukan penerapan GUG menentukan akuntabilitas publik dalam mewujudkan STIE Indonesia yang akuntabel.

Penelitian Anggraeni (2019) dan Larasati (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan penerapan GUG sudah cukup baik dan model GUG layak untuk dipertimbangkan dalam mewujudkan perguruan tinggi yang independen,

transparansi dan akuntabel. Ada persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada penerapan GUG pada perguruan tinggi. Sementara perbedaan terletak pada temuan hasil penelitian. Pada penelitian terdahulu temuan hasil mengacu pada transparansi keuangan, sarana prasarana dan prinsip GUG. Sedangkan penelitian ini temuan hasil melihat sejauhmana penerapan GUG bagi akuntabilitas publik berdasarkan upward, downward, inward dan outward accountability untuk mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel.

Berdasarkan keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, dipahami bahwa GUG bagi akuntabilitas publik sebagai bentuk kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab bersama pada STIE Indonesia atas standar kinerja dan peningkatan mutu pendidikan tinggi kepada para pemangku kepentingan. Kemampuan dan komitmen untuk bertanggung jawab ini berhubungan dengan tuntutan bagi para pejabat suatu lembaga pendidikan untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, ke mana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Dalam hal ini, publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas publik dalam penerapan GUG ini juga tidak terbatas pada bentuk laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Penerapan GUG bagi akuntabilitas publik di STIE Indonesia dapat berkembang pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokratis serta terdapat kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dengan demikian, akuntabilitas pendidikan tinggi merupakan suatu perwujudan kewajiban dari lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan proses pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, perlu selalu diupayakan untuk diperbaiki dan ditingkatkan sehingga proses pembelajaran berlangsung optimal dan efektif, serta dapat meningkatkan mutu lulusannya.

Penerapan GUG bagi akuntabilitas publik menunjukkan bahwa STIE Indonesia berupaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dengan mengacu pada perwujudan akuntabilitas yang dapat meningkatkan mutu kinerja kelembagaan pendidikan tinggi (institutional performance) dan kepercayaan publik (public trust) yang akuntabel. Artinya pihak STIE Indonesia dituntut terus meningkatkan pengelolaan semua komponen penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan akuntabel, sehignga STIE Indonesia dapat mengembangkan institusi secara berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut:

1. Good University Governance (GUG) sudah diaktualisasikan dengan baik di STIE Indonesia Makassar. Ini berarti GUG telah dipahami sebagai sistem tata kelola sekolah tinggi yang baik yang diterapkan sesuai dengan struktur kepemilikan (batasan tugas dan wewenang pihak penelitian perguruan tinggi dan

profesionalisme pengelola), tanggungjawab dan otorisasi terkait dengan hubungan keuangan, transparansi keuangan dan informasi serta kepemimpinan dan manajemen yang mengatur organisasi dan hubungan lini di lingkup perguruan tinggi.

2. Penerapan Good University Governance (GUG) bagi akuntabilitas publik telah diterapkan di STIE Indonesia Makassar. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawabkan perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada publik baik secara upward accountability yang mencakup prosedural dan birokrasi, downward accountability terkait pengambilan keputusan dan kesejawatan perguruan tinggi, inward accountability sebagai pertanggungjawaban standar profesi dan kode etik telah dilaksanakan dalam mewujudkan STIE Indonesia Makassar yang akuntabel. Sementara outward accountability yang terkait dengan pertanggungjawaban pemangku kepemimpinan atas kebijakan dan tindakan kepada masyarakat masih menemukan kendala, dikarenakan ada perbedaan visi dan misi antara perguruan tinggi dengan pihak luar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. STIE Indonesia Makassar terus mempertahankan penerapan Good University Governance (GUG) yang sudah diaktualisasikan dengan baik bagi akuntabilitas publik untuk mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel dan menciptakan excellent service dalam pelayanan akademik saat ini dan di masa mendatang.
2. Melakukan pembenahan dalam hal outward accountability dalam penerapan kebijakan dan tindakan kepada masyarakat yang dari hasil penelitian menunjukkan masih ada kendala khususnya dalam penyatuan visi dan misi. Dalam hal ini pihak STIE Indonesia Makassar perlu lebih membuka diri untuk memberi peluang kepada semua pihak dalam bekerjasama mewujudkan pelayanan pendidikan tinggi yang akuntabel untuk masyarakat.
3. Menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti mengenai GUG dan akuntabilitas publik seperti melakukan penelitian perbandingan dengan beberapa PTS atau PTN.

DAFTAR PUSTAKA

Amilin, 2016. Dampak Penerapan Good university governance terhadap Kinerja Manajerial melalui Implementasi Anggaran Berbasis Partisipatif. Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016.

Anggraeni, Rasmi Nur, 2019. Implementasi of Good university governance at the Muhammadiyah University of Palu. Jurnal Sinar Manajemen. Volume 6 Nomor 2, 2019. ISSN 2337-8743. Print) | | ISSN 2598-398X. Online.

Ayu, Maristiana, 2020. Dampak Penerapan Prinsip Good university governance terhadap Keunggulan Bersaing dengan Intellectual Capital sebagai Variabel Mediasi. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah tinggi Sang Bumi Ruwa Jurai.

Bovens, Michael, 2018. Accountability for College. Published by John Wiley and Sons, New York.

Burk, Megan, 2018. The Organization Governance. Media Research, Freie Universitat Berlin, Germany.

Djokopranoto, R, 2017. Pengelolaan Sekolah tinggi di Indonesia: Pedoman Tata Kelola Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Andi.

Fuad, Khoirul, 2018. Implementasi Good university governance pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Jawa Tengah. Majalah Ilmiah Solusi, Vol. 16, No. 1 Januari 2018, ISSN: 1412-5331.

Haryatmoko, J, 2018. Etika Publik untuk Pejabat Publik dan Politisi. Yogyakarla: Penerbit Kanisius.

Indonesian Institute of Corporate Governance, 2018. Tata Kelola Perusahaan. Retrieved February 20, 2013 from: http://iicg.org/v25/tata-kelola-perusahaan.

Indrajit, Richardus Eko dan Djokopranoto, Richardus, 2017. Manajemen Perguruan Tinggi Modern. Yogyakarla: Percetakan ANDI.

Juliani, M, 2018. Analisis Penerapan Good University Govemance Melalui Efektivitas Pengendalian Intem dan Komitmen Organisasional.Jurnal Politeknik Negeri Sriwij aya.

Krina, Loina Laloo, 2018. Indikator & Alat, Jhtr Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Publik Govemance Bappenas.

Larasati, Rudiawie, 2018. Analisis Penerapan Good university governance pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura. Journal of Applied Managerial Accounting. Vol. 2, No. 2, September 2018, Page 304-323 ISSN: 2548-9917.

Martha, Ntim, and Stephen, Collins G., 2017. Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions. Accounting, Atditing & Accountability Journal, Vol. 30 Issue: l, pp.65-l l8.

Muhsin, 2020. The Relation of Good university governance and Student Satisfaction. International Journal of Higher Education, Vol. 9 No. 1, 2020, ISSN: 1972-6044, doi:10.5430/ijhe. v9n1p1;URL: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n1p1.

Mutiarin, Dya, 2019. Good university governance dan Internasionalisasi Program Studi: Studi Kasus pada 2. Dua) Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri. PTN) dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. PTM. JIAP Vol 5, No 2, pp 187-197, 2019. ISSN 2302-2698.

Nasution, 2017. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Nessil, Sahiba, 2017. Corporate Governance, Journal of Law and Economics, (Vol. 48, Oktober), hlm 371.

Nurhayati, Isnaeni., 2017. Pengaruh Otonomi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi terhadap Kinerja Manajerial. Trikonomika, Vol. 13, No. l, Juni 2014, Hal. l-12, ISSN 2355-7737.

Rhodes, Deirmand, 2017. Public Administration – Making Reexamined. San Francisco: Chandler Publishing Company.

Rhomand, Fred. R, 2016. A Blueprint for Corporate Governance: Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value, AMACOM, USA.

Sastomo, Husin, 2017. Perumusan Panduan Program Studi Sekolah tinggi. Jakarta: Grassindo.

Agustina, Sri, 2016. Impelemtnasi Prinsip Good university governance terhadap Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 09, Agustus 2016

Sriharioto, Ninik dan Wardhani, Suryandari, 2019. Internal Control and Risk Management in Ensuring Good University Govemance. Journal of Education and Vocational Research Vol.6, No. 2, pp.6-12, June 2015, ISSN 2221-2s90.

Soeraji, 2019. Analisis Keuangan Organisasi: Sebuah Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumarsono, Sonny, 2018. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif untuk Penelitian Ilmiah. Edisi Ketiga, Badan Penerbit Sekolah tinggi Diponegoro, Semarang

Sumirwan, Sandiwan, 2019. Manajemen Sekolah tinggi di Indonesia. Jakarta: Sinar Pustaka.

Thomas, Marshall, 2018. The Administration Public System. Published by Thompson Learning Press, New York.

Trow, John, 2019. Public Accountability for Accountable Organization. Publishing by McGraw Hills, New York.

Wahab, Abdul Azis, 2018. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good university governance Terhadap Citra Serta Implikasinya pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN. Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. XVII, No.1 Oktober 2013.

Wahyuddin, Agus, 2017. Hubungan Good university governance terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi. Jurnal Keuangan dan Perbankan 21(1) 2017. ISSN:2443-2687.

Winarno, Faisal, 2018. Good Governance dalam Administrasi Publik. Bandung: Mandar Maju.

Yokahoma, 2017. Corporate Governance and Risk: A System Approach, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.

.